

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab IV ini akan membahas kesimpulan terkait hasil penelitian mengenai evaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Bab ini merupakan penutup dan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

4.1 KESIMPULAN

1. Implementasi dan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora yang berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015, program dan kegiatannya berhasil diimplementasikan sekitar 85% dari semua program yang ditetapkan. Hasil atau realisasi dari implementasi program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016-2020 mencapai peningkatan yang cukup bagus, sehingga kenaikan kemiskinan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena kurangnya upaya dari Pemerintah Kabupaten dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, melainkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali Kabupaten Blora.

2. Dari ke-6 (enam) indikator evaluasi William Dunn, indikator responsivitas dan ketepatan merupakan indikator yang telah terpenuhi di Kabupaten Blora terkait percepatan penanggulangan kemiskinan. Bahwasannya masyarakat miskin memberikan respon positif dan merasakan dampak positif terkait program bantuan dari kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan karena mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan mereka sebab melalui bantuan tersebut mampu membantu meringankan beban perekonomian mereka. Indikator lainnya seperti efektivitas belum terpenuhi karena masih terdapat program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten dan masih adanya program yang belum berjalan efektif dan indikator kecukupan belum memenuhi harapan masyarakat miskin. Selain itu pada indikator efisiensi jumlah alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih kurang sesuai antara anggaran yang diberikan dengan anggaran yang terealisasi dan target kinerja yang ditetapkan; serta terkait indikator pemerataan belum dijalankan secara meratanya implementasi program karena bantuan dan kegiatannya masih difokuskan pada lokus desa miskin.

4.2 SARAN

1. Pemerintah Kabupaten kedepannya dapat menjalankan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang belum berlangsung menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten perlu memprioritaskan semua program penanggulangan kemiskinan supaya program yang kegiatannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pemerintah Kabupaten perlu memperluas sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan supaya program bantuan dapat diberikan secara merata tidak hanya difokuskan pada lokus prioritas desa miskin saja.